Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau .....

Dari Halaman 1

bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyatakan, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan ini. Setelah itu, kata Dasco, Prabowo menyampaikan keputusannya.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.

Seperti diketahui, empat pulau tersebut kini menjadi kisruh karena disebut berada di wilayah Sumut. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata mendukung klaim Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri, yang terbit pada 25 April 2025.

"Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin (26/5).

Pihak Pemprov Aceh pun tidak menerima keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut sampai saat ini masih diperjuangkan. Pihak Pemprov Aceh masih berjuang agar keempat pulau kembali masuk wilayah administratif Aceh.

Kata Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantas memberikan penjelasan terkait polemik empat pulau yang saling diperebutkan oleh kedua pemprov. Kemendagri menjelaskan kisruh empat pulau tersebut bermula dengan adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh pada 2009 silam.

Safrizal menyebut pada saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut. Dia mengatakan dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

"Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu," jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6)**.(det/js)**

Nezar Djoeli: Sabar, Tunggu Keputusan .....

Dari Halaman 1

Presiden Prabowo yang dengan cepat mengambil alih terkait polemik empat pulau Provinsi Sumut – Aceh dan meminta agar seluruh masyarakat bersabar dan patuh apapun hasil dari keputusan tersebut.

"Pak Prabowo berhasil memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya terutama masyarakat Sumut dan Aceh atas polemik empat pulau tersebut. Ini merupakan bentuk kerja nyata presiden dan menunjukkan bahwa Prabowo Sangat peduli dan peka terhadap suara rakyatnya," kata HM Nezar Djoeli dalam keterangan persnya, Minggu (15/6/2025).

Nezar pun berharap kepada semua pihak, baik masyarakat Sumut dan Aceh, agar tetap bersabar mematuhi dan mentaati apapun keputusan dari Presiden Prabowo yang mengambil alih persoalan empat pulau di Aceh tersebut dan memutuskannya pekan depan.

"Kepada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara agar tetap tenang tidak terpancing terhadap isu-isu miring baik di tengah masyarakat maupun di media sosial. Kita ini semua bersaudara, jangan karena persoalan tersebut kita jadi terpecah belah Dan mempercayakan sepenuhnya kepada presiden Prabowo menghasilkan keputusan terbaik," harap pria berdarah Sumut dan Aceh**.(A-10)**

Diduga Berkaitan Potensi Migas .....

Dari Halaman 1

empat pulau itu menjadi alasan utama bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengalihkan batas wilayah dari Aceh menjadi Sumut.

"Sudah pasti 1.000 persen, kalau bisa 5.000 persen itu persoalannya (keempat pulau sengketa mengandung)," ujarnya dalam diskusi publik, Sabtu (14/6).

Pasalnya, ia menegaskan status wilayah keempat pulau itu sejatinya telah disepakati Gubernur Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 1992, yakni Ibrahim Hasan dan Raja Inal Siregar dan disaksikan Menteri Dalam Negeri saat itu, Rubini.

Di sisi lain, ia mencontohkan jika memang alasannya murni karena faktor geografis maka seharusnya Pulau Andaman menjadi milik Aceh. Akan tetapi, Muslim menyebut hal itu tidak pernah dilakukan oleh Aceh meskipun mengetahui ada banyak kekayaan alam yang tersimpan di sana.

"Itu pulau Andaman yang dekat dengan Sabah juga geografisnya dekat, tapi tidak. Aceh punya prinsip, tidak akan mau mencaplok. Padahal itu sumber kekayaan minyaknya yang luar biasa sekali," tuturnya.

Ia lantas meminta Presiden Prabowo Subianto agar dapat memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buntut kebijakannya itu.

"Presiden harus memberi punishment juga terhadap bawahannya. Jangan begitu saja. Seorang Menteri memberikan keputusan yang menghebohkan jagad maya, masyarakat was-was," pungkasnya.

Status kepemilikan wilayah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Penyebabnya, Kemendagri menetapkan empat pulau tersebut menjadi bagian Tapanuli Tengah, Sumut setelah sekian lama menjadi wilayah administrasi Aceh Singkil. Kondisi ini menimbulkan gejolak, terutama dari masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.

Terbaru, Kemendagri mengaku bakal mengkaji ulang status kepemilikan 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumut usai menjadi polemik**. (cnni/js)**

JK Singgung Perjanjian Helsinski .....

Dari Halaman 1

dang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, keempat pulau itu sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Keputusan itu pun menimbulkan gejolak, khususnya dari masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan, keempat pulau itu merupakan milik provinsinya.

Muzakir menyatakan ia memiliki alasan, bukti, hingga data yang kuat membuktikan jika pulau itu milik Aceh.

"Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak zaman dahulu itu punya Aceh," ujarnya.

Lalu, Pemprov Aceh menyesalkan alasan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang menyebut landasan empat pulau milik Aceh masuk ke Sumut mengacu batas wilayah darat.

Padahal hingga saat ini, batas wilayah laut antara dua provinsi tersebut masih bersengketa. Pemprov Aceh mengingatkan Kemendagri untuk mematuhi kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut terkait status 4 pulau yang dinyatakan sah milik Aceh.

Terpisah, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla merujuk Perjanjian Helsinki di tengah polemik tersebut.

JK menyatakan harus ada rujukan historis dalam menangani sengketa ini. Perbatasan wilayah sebenarnya sudah diatur dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.

"Mengenai perbatasan itu, ada di Pasal 1.1.4, mungkin bab 1, ayat 1, titik 4, yang berbunyi perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi, pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ," ujarnya dalam konferensi pers di kediamannya, Jumat (13/6)**.(cnni/js)**

Iran Siap Hancurkan Rezim Netanyahu .....

Dari Halaman 1

"Operasi ofensif Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan berlanjut dengan kekuatan dan cakupan yang lebih besar jika permusuhan dan agresi ini berlanjut," kata IRGC.

IRGC menambahkan serangan Iran terhadap Israel akan menargetkan "fasilitas produksi bahan bakar untuk jet tempur dan pusat pasokan energi" dan operasi tersebut akan melibatkan sejumlah besar pesawat nirawak dan rudal.

CNN menyebut belum bisa memverifikasi klaim IRGC tersebut secara independen. Namun hal senada juga diungkap seorang sumber kepada Al Jazeera.

Seorang pejabat keamanan senior di Iran mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Teheran kini sedang mempersiapkan diri untuk memperpanjang konfrontasi dengan Israel.

Pejabat yang mengatakan secara anonim itu mengatakan memang bukan Iran yang memulai peperangan ini, tapi mereka yakin sebagai pihak yang menentukan akhir dari konflik tersebut.

Pejabat itu menyebut ini adalah perang Netanyahu dan hasilnya adalah kehancuran Israel. Iran di sini hanya membela rakyatnya.

Sementara itu, ia mengatakan Presiden AS, Donald Trump perlu memutuskan apakah dia akan menggunakan keuangan negaranya untuk membantu Netanyahu dalam perang ini.

Perang Israel vs Iran terbaru meletus pada Jumat (13/6). Angkatan Udara Israel disebut melakukan serangan ke Iran pada Jumat (13/6) pagi waktu setempat. Menurut laporan kantor berita Nour News, ledakan disebut terdengar di timur laut ibu kota Iran, Teheran.

Sebelumnya Israel memang disebut tengah menyiapkan rencana untuk menyerang Iran besar-besaran.

Sejumlah sumber yang mengetahui hal ini mengatakan kepada NBC News bahwa Negeri Zionis saat ini sedang mempertimbangkan untuk menyerang Iran dalam beberapa hari mendatang.

Pada Minggu (15/6), Israel menyerang markas besar Kementerian Pertahanan Iran di Teheran, menurut laporan media setempat seperti diberitakan CNN. Serangan itu menyebabkan kerusakan kecil pada salah satu gedung.

Sementara itu, setidaknya dua orang tewas di Distrik Utara Israel akibat dari serangan Iran pada Sabtu (14/6) malam. Delapan tim pemadam kebakaran dan penyelamat terus beroperasi di lokasi serangan pada Minggu (15/6) pagi, seperti diberitakan CNN.

Petugas mengatakan mereka menyelamatkan empat perempuan yang terjebak, tetapi dua di antaranya meninggal dunia**.(cnni/js)**

Polri dan KPK Dalami Dugaan Pidana Tambang .....

Dari Halaman 1

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menambahkan penyelidikan dilakukan terhadap empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut pemerintah.

"Kita masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan Undang-undang kita boleh (menyelidiki)," kata Nunung.

Dia menjelaskan proses penyelidikan itu dimulai dari temuan dugaan pelanggaran pidana. Ia menyebut salah satu yang akan menjadi fokus penyelidikan yakni perihal kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

"Makanya, ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi," imbuhnya.

Sementara itu, KPK juga tengah mengkaji potensi korupsi terkait kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi itu masih dalam proses penelaahan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan korupsi.

"Sebenarnya kami sudah melakukan kajian. Jadi, dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi itu sudah melakukan semacam kegiatan di sana, kemudian melihat potensi-potensinya seperti apa," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/6).

"Namun demikian, apakah kemudian kajian tersebut memang ada indikasi korupsi? Tentu itu masih menjadi sebuah telaah, dan nanti ada proses yang harus dilewati," tandasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan mencabut empat IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. **(cnni/js)**

Pendekatan Budaya Kunci Cegah Konflik Tajam .....

Dari Halaman 1

Anak Medan) yang digelar di Stadion Kebun Budaya, Kota Medan, Jumat malam (12/6/2025).

Diskusi ini dipandu oleh Zahraturrahmi dan menghadirkan dua narasumber, yaitu Alwi Dahlan Ritonga, akademisi dari Universitas Sumatera Utara, serta Muhammad Liputra, mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Menurut Muhammad Liputra perlunya pendekatan aspek budaya dari persoalan ini. Ia menyampaikan bahwa sengketa maritim seperti ini banyak terjadi di Indonesia karena wilayah laut lebih luas dibanding daratan.

"Puncaknya terjadi pada 2008. Melalui tim nasional yang terdiri dari Kemendagri, BIG, TNI AL, dan lembaga lainnya, dilakukan pengukuran wilayah Sumut dan Aceh. Dalam perhitungan itu, keempat pulau masuk kawasan Sumut," jelasnya.

"Mereka (Aceh) tetap protes dan keberatan, lalu pemerintah pusat merevisi, tapi hasilnya tetap sama: empat pulau itu masuk Sumatera Utara," tambahnya.

Liputra mengungkapkan, kekhawatirannya bahwa isu ini bisa memicu disintegrasi, mengingat riwayat Aceh yang pernah bergolak.

"Ini rentan terhadap persoalan disintegrasi yang kita khawatirkan. Inilah sebabnya pendekatan budaya harus diperkuat agar tidak mengarah ke sana," pintanya.

Ia juga menyinggung sejarah pascatsunami Aceh, di mana sempat terjadi ketegangan sosial dengan pendatang dari Jawa, namun hubungan dengan warga Sumut dinilai lebih harmonis.

"Banyak yang menunjukkan KTP Medan, GAM menerima dengan baik. Walau mereka bermusuhan dengan pemerintah, tapi tidak dengan Sumut. Ini jadi sejarah bahwa ada kecocokan budaya Aceh dan Sumut," ungkapnya.

Liputra berharap agar keharmonisan budaya antara dua daerah ini tetap dijaga.

"Kerukunan yang sudah lama terjalin jangan sampai terputus karena polemik ini. Sejarah dan budaya Sumut dan Aceh sudah terjalin sangat baik," pungkasnya**.(R)**

Fadli Zon Berupaya .....

Dari Halaman 1

nipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi, khususnya kekerasan

terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998."

NIR-EMPATI

Menurut Usman, pernyataan Fadli menunjukan sikap nir-empati (tak mampu merasakan perasaan orang lain) terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama korban.

Politisi Gerindra, sejarawan, dan sebenarnya mantan aktivis, itu, dinilai sengaja atau tidak sengaja gagal memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, terlebih lagi ada kecenderungan secara sengaja menyasar pihak yang dijadikan korban, yaitu perempuan Tionghoa.

"Mengecam dan menolak keras pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 ,serta menyebutnya sebagai rumor. Pernyataan ini mencederai upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban serta berpotensi melanggengkan budaya impunitas," ungkapnya.

DISKREDIT

Pernyataan Fadli tersebut dinilai mendiskreditkan atau merendahkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan pendokumentasian dan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian dari peristiwa tersebut.

Usman menjelaskan, proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dipimpin Fadli sebagai Menteri Kebudayaan, juga dinilai akan menyingkirkan narasi penting tentang pelanggaran berat HAM dari ruang publik.

"Ironisnya, alih-alih mempertanyakan absennya cerita tentang kekerasan Mei 1998 dalam buku sejarah, Fadli Zon sebagai menteri seharusnya memastikan kasus-kasus ini dimuat secara jujur dan adil, serta berpihak pada suara korban. Pengosongan narasi ini justru memperdalam ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak-hak korban," tukasnya.

LAPORAN TGPF

Padahal, laporan akhir TGPF mencatat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam Peristiwa Mei 1998, dibagi dalam beberapa kategori.

"Perkosaan, perkosaan dan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di depan tempat usaha," jelasnya.

Ia menjelaskan terdapat 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual yang diperoleh dari sejumlah bukti, baik keterangan korban, keluarga korban, saksi mata, saksi lainnya (perawat, psikiater, psikolog, pendamping, rohaniawan), hingga keterangan dokter.

Selain itu, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah Peristiwa Mei 1998.

Dalam kunjungan ke Medan, TGPF juga mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4–8 Mei 1998.

"Setelah Peristiwa Mei tersebut, juga diikuti dengan 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) kasus terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998," jelas Usman.

GANG RAPE

Lebih lanjut, TGPF menemukan sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape (pemerkosaan berkelompok), yang mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.

Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya, menemukan ada kesengajaan menyasar perempuan beretnis Tionghoa, yang pada saat itu dikonstruksikan sebagai kambing hitam akibat krisis moneter di Indonesia.

"Kesengajaan ini tampak dari adanya kesaksian salah satu perempuan yang tidak jadi diperkosa karena ibunya yang 'pribumi' berhasil meyakinkan para pelaku bahwa ia adalah anaknya," ungkap Usman.

Meskipun temuan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut, hingga kini tidak ada penyelesaian hukum yang memadai di tingkat penyidikan hingga proses pengadilan. "Namun fakta memilukannya adalah hingga saat ini kasus tersebut tidak pernah tuntas. Tidak pernah ada pengungkapan kebenaran, kepastian bahkan keadilan baik dalam peristiwa ini," tutur Usman. **(mi/cp/js)**

Saatnya Presiden Merajut Persatuan

Dari Halaman 1

penuh kehati-hatian.

Pulau-pulau itu bukan sekadar titik di peta. Bagi sebagian masyarakat Aceh, keberadaannya berkait erat dengan identitas dan sejarah panjang daerah yang pernah mengukir perjanjian damai monumental (MoU Helsinki 2005). Tak heran jika wacana pengalihan wilayah ini menuai penolakan dari Pemerintah Aceh dan sebagian masyarakatnya. Sentimen itu bukan soal sentimeter koordinat, melainkan soal makna kebersamaan dalam bingkai NKRI.

Di sisi lain, Sumatra Utara berpegangan pada keputusan administratif yang telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Keputusan itu tentu tak lahir dalam ruang kosong; ada kajian teknis, hukum, dan data spasial. Namun, kita tahu, keputusan hukum seringkali tak mampu menjawab luka sosial jika komunikasi tidak dijalankan dengan cermat.

Presiden Prabowo berada di titik yang sangat krusial. Menyelesaikan persoalan ini bukan semata menegakkan batas, tetapi juga meneguhkan kembali persatuan. Semua pihak berharap keputusan akhir nanti mampu merangkul keadilan untuk semua, tidak menyisakan bara di hati masyarakat Aceh, dan tidak mengabaikan dasar hukum dan administrasi negara.

Maka, penyelesaian ini perlu mengedepankan dialog inklusif. Pemerintah pusat perlu mendengar suara Aceh, menggali narasi sejarahnya, seraya memastikan hak-hak Sumatra Utara tak terabaikan. Sebab, memaksakan keputusan tanpa empati hanya akan memperuncing jarak antardaerah. Presiden harus menjadi jembatan perasaan antar saudara sebangsa.

Kita percaya, Indonesia cukup dewasa untuk menyelesaikan sengketa internal tanpa gaduh, tanpa luka baru. Presiden punya kesempatan emas untuk menjadikan ini contoh kepemimpinan yang mengedepankan persatuan, bukan sekadar administratif batas wilayah.

Empat pulau itu, pada akhirnya, bukan soal siapa yang memiliki, tetapi bagaimana bangsa ini memelihara persaudaraan di atasnya.